

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Aartje Tehupeiorry. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Adrian Sutedi. 2016. *Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Florianus SP Sangsun. 2008. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

H.M Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Sripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Istijab. 2017. *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*. Surabaya: Qiara Media Partner

_____. 2020. *Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat*. Pasuruan: CV. Penerbit Kiara Media.

Jimmy Jose Sembiring. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2010. *Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

_____. 2001. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soerojo Wignjodipoero. 1987. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligencia Media

Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenamedia Group.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Komprehensif*. Jakarta: Prenamedia Group.

_____. 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana.

Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

_____. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Jurnal

Ismail, Ilyas. 2010. “Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, dalam KANUN No. 50

Ismi, Hayatul. “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, No. 01, Vol. 3

Maladi, Yanis. 2010. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca amandemen” dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22, No. 03

Feronika, Azmi Fendri, dan Yulia Mirwati. 2019. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”, dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 04, No. 02

